



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

(Studi di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**YOLA MELINDA
NIM. 11775201461**

PROGRAM S1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

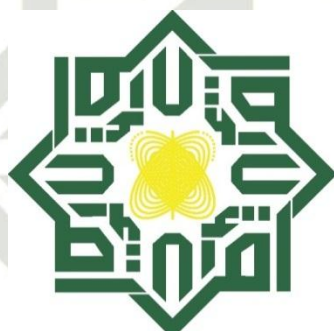
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

(Studi di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

YOLA MELINDA
NIM. 11775201461

PROGRAM S1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**

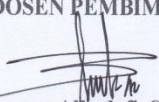
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YOLA MELINDA
NIM : 11775201461
PEOGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA DAN KELURAHAN DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
(STUDI DI KELURAHAN PERAWANG
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK)

DISETUJUI OLEH

DOSEN PEMBIMBING



Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
NIP. 130 712 075

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. H. Mahvarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001



KETUA PROGRAM STUDI
Ilmu Administrasi Negara


Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.si
NIP. 19790101 200710 1 003


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

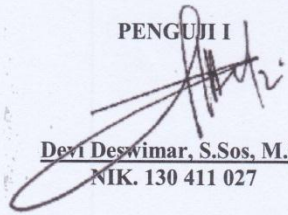
NAMA : YOLA MELINDA
NIM : 11775201461
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL
JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA DAN KELURAHAN DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
(STUDI DI KELURAHAN PERAWANG
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN
SIAK)

TANGGAL UJIAN : 23 JULI 2021

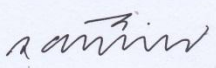
Disetujui Oleh
KETUA PENGUJI


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

PENGUJI I


Dexi Deswimar, S.Sos, M.Si
NIK. 130 411 027

PENGUJI II


Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si
NIK. 130 717 059

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

Oleh :

Yola Melinda

Penelitian ini menjelaskan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ditinjau dari permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dan 2) untuk mengetahui faktor penghambat dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ditinjau dari peraturan menteri dalam negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Perawang belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri. Sebab masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi sehingga penyelenggaraan pemerintahan kelurahan perawang dikatakan cukup baik. Adapun Faktor Penghambat yang ditemukan menurut teori implementasi kebijakan publik Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Publik, Evaluasi Perkembangan, Kelurahan, Penyelenggaraan Pemerintahan.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia –Nya yang tidak terhingga. Semoga kita insan yang *Dhoif* ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring dalam setulus hati kepada baginda *Nabi Muhammad saw.* dan ahlul baitnya, sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi *inspiring leader* dan *inspiring human* bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita dihari perhitungan kelak.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu penulis memohon maaf kepada pembaca. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Syafrizal dan Ibunda Nurlaini, orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa restu, semangat dan dukungan serta kasih sayang baik bersifat moril maupun materil hingga suatu pencapaian yang peneliti impikan dapat tercapai.
2. Dina Nuriza, Muhammad Maulana, dan Muhammad Daffa Alvaro, Selaku Adik tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau.
4. Ibu DR. Hj. Mahyarni, SE. MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, M.A. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku Dosen Penasehat Akademik, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan memberi ilmu, arahan demi lancarnya penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
10. Bapak Nanang Suhendar, S.STP selaku pimpinan kantor Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang beserta pegawai yang bersedia membantu penulis dalam penelitian.
11. Teman-teman Penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penulisan skripsi ini: Cahyani Nadia, Gita Nafaizal, Fitriah Kulandari, Edy Saputra, Ary Saputra, Dwi Prasetya.

12. Rekan-rekan seperjuangan penulis, Fira Amarda, Elpita Wahyuni, Annisa Aulia, Asmadiani Pratiwi, Imelda Maisyaroh dan Anisa Afriani Harahap, sebagai sahabat bertukar pikiran, sahabat berkeluh kesah, sahabat yang selalu mendampingi.

13. Seluruh teman Ilmu Administrasi Negara yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.

14. Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan.

15. Wanda Ridwan Nazamuddin yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat dan selalu sabar kepada penulis. Terimakasih atas semuanya yang telah diberikan.

Semoga segala bentuk motivasi, semangat dan do'a serta bantuan yang diberikan mendapat imbalan dari *Allah SWT*. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah kripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Pekanbaru, 08 Juli 2021
Penulis

YOLA MELINDA
NIM. 11775201461



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Implementasi Kebijakan Publik	11
2.1.1 Pengertian Implementasi	11
2.1.2 Pengertian Kebijakan	12
2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan	13
2.1.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	14
2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan	15
2.2 Administrasi Publik	16
2.3 Administrasi Pemerintahan Daerah	18
2.3.1 Pemerintahan Desa	21
2.3.2 Pemerintahan Kelurahan	25
2.3.3 Perbedaan Desa dan Kelurahan	29
2.4 <i>Good Governance</i>	31
2.4.1 Unsur-Unsur <i>Good Governnace</i>	36
2.4.2 Prinsip <i>Good Governnace</i>	36
2.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	40
2.6 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	44



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.7 Penelitian Terdahulu	45
2.8 Pandangan Islam	47
2.9 Defenisi Konsep	49
2.10 Konsep Operasional	50
2.11 Kerangka Pemikiran.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	52
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	52
3.2.1 Jenis Data.....	52
3.2.2 Sumber Data	52
3.3 Informan Penelitian.....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.5 Teknik Analisa Data	56

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kelurahan Perawang	58
4.2 Visi Misi Kelurahan Perawang	58
4.3 Profil Kelurahan Perawang	59
4.4 Struktur Kepengurusan Di Kelurahan Perawang	61
4.5 Geografis Kelurahan Perawang.....	67

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (studi di kelurahan perawang kecamatan tualng kabupaten siak).....	68
5.1.1 Pemerintahan	70
5.1.2 Kinerja	81
5.1.3 Inisiatif dan Kreatifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat	89
5.1.4 Kelurahan Berbasis Teknologi Informasi/ <i>E-Government</i>	91

5.1.5 Pelestarian Adat dan Budaya.....	94
5.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (studi di kelurahan perawang kecamatan tualng kabupaten siak).....	96

PENUTUP

6.1 Kesimpulan	100
6.1.1 Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)	100
6.1.2 Hambatan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)	102
6.2 Saran	102

DAFTAR PUSTAKA DOKUMENTASI LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

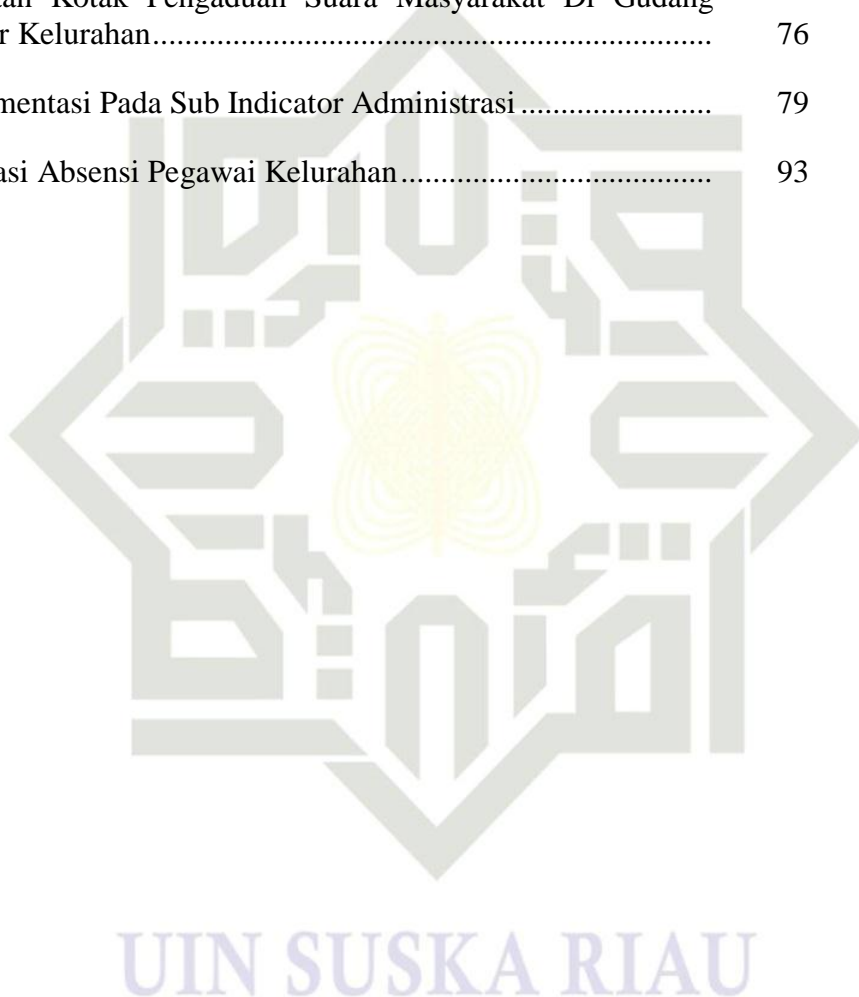
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1	Daftar Pegawai Kelurahan Perawang.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 2.1	Perbedaan Desa dan Kelurahan.....	30
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	46
Tabel 2.3	Konsep Operasional	50
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	54
Tabel 4.1	Batas-Batas Wilayah Kelurahan.....	60
Tabel 4.2	Jarak di Kelurahan Perawang Ke Pemerintahan	61
Tabel 4.3	Jarak Geografis Kelurahan Perawang	67
Tabel 5.1	Penilaian pada Sub Indikator Sarana dan Prasarana	72
Tabel 5.2	Penilaian pada Sub Akuntabilitas.....	76
Tabel 5.3	Penilaian pada Sub Indikator Penilaian pada Administrasi	79
Tabel 5.4	Penilaian pada Sub Indikator Strategi Pemberdayaan Masyarakat	83
Tabel 5.5	Penilaian pada Sub Indikator Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat	84
Tabel 5.6	Penilaian pada Sub Indikator Pembinaan Masyarakat	86
Tabel 5.7	Penilaian pada Sub Indikator Budaya Kerja	87
Tabel 5.8	Penilaian pada Indikator Inisiatif dan Kreatifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	90
Tabel 5.9	Penilaian pada Indikator <i>E-Government</i>	91
Tabel 5.10	Penilaian pada Indikator Pelestarian Adat dan Budaya	95

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kelurahan Perawang	62
Gambar 4.2	Struktur Lingkungan, Rw Dan Rt Di Wilayah Kelurahan	66
Gambar 5.1	Sarana Dan Prasarana Kelurahan Perawang	73
Gambar 5.2	Keadaan Kotak Pengaduan Suara Masyarakat Di Gudang Kantor Kelurahan	76
Gambar 5.3	Dokumentasi Pada Sub Indicator Administrasi	79
Gambar 5.4	Aplikasi Absensi Pegawai Kelurahan	93



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia secara geografis merupakan gagasan kepulauan. Kondisi ini menyebabkan lahirnya berbagai suku dengan adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan ragam bahasa. Pemerintah tidak mungkin menangani berbagai urusan pemerintahan menyangkut kepentingan masyarakat yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perlunya pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Masa sentralisasi berakhir setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan pemerintahan desa berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Seiring dengan perubahan dan tantangan yang ada di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan/atau desa.

Bentuk penyelenggaraan negara kesatuan yang dilaksanakan hingga struktur pemerintah yang paling bawah yaitu desa/ kelurahan. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,



kepentingan masyarakat, hak asasi dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Desa sebagai entitas yang memiliki otonomi pada tingkat lokal dan bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota.

Dengan demikian Kelurahan sebagai organisasi terendah di bawah camat mempunyai tugas memberikan pelayanan pada masyarakat yang memikul kewajiban dari pada hak, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 pasal 5 tentang tugas dan fungsi kelurahan itu adalah pelayanan masyarakat.

Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang berada pada baris terdepan dalam pelayanan masyarakat maka dari itu penyelenggaraan pemerintahan harus dikelola dengan baik oleh pihak kelurahan yang ada didalamnya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dilihat dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good Governance* sendiri merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan jasa publik. Dimana prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik itu ialah prinsip efektifitas, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.

Kepemerintahan yang baik merupakan suatu tindak lanjut atau evolusi penyelenggaraan pemerintahan dari perubahan pemerintahan yang baik dalam suatu bentuk pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik ini cenderung lebih efektif dan efisien dalam proses dan tujuannya sehingga dikategorikan sebagai suatu proses pemerintahan yang baik bisa menyeimbangkan kesetaraan pemerintah dengan pihak lain di berbagai sektor untuk menciptakan suatu keteraturan di dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Pemerintah daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan harus pula diiringi dengan penerapan prinsip pemerintahan yang baik.

Wujud daripada penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya pada kelurahan dapat dilihat pada evaluasi perkembangan kelurahan. Dimana Pemerintahan Pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk menilai suatu perkembangan kelurahan. Kelurahan dapat dikatakan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkembang apabila telah memenuhi seluruh indikator-indikator pada evaluasi perkembangan kelurahan. Perkembangan kelurahan ini lah yang akan menentukan baik atau tidaknya suatu penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kelurahan ini telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan kelurahan merupakan suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahap kemajuan kelurahan.

Tujuan diselenggarakannya penilaian evaluasi perkembangan kelurahan adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kelurahan tersebut terkhususnya pada penyelenggaraan pemerintahan, Dimana bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dapat dikatakan sangat baik apabila semua indikator yang ada di evaluasi perkembangan kelurahan khususnya bidang pemerintahan telah diimplementasikan seluruhnya.

Kelurahan Perawang merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Dimana kelurahan perawang merupakan satu satunya kelurahan yang ada di Kecamatan Tualang. Di Kelurahan Perawang memiliki 11 pegawai kelurahan, berikut daftar pegawai Kelurahan Perawang.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.1 Daftar Pegawai Kelurahan Perawang

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Nanang Suhendra, S.STP	Penata Muda Tk. I {III/b}	Lurah
2	Suhartati, S.Sos	Penata Muda {III/a}	Sekretaris Lurah
3	Nur'aisyah, S.Sos	Penata {III/c}	Kasi Pemerintahan
4	Sudirman, S.H	Penata Muda Tk. I {III/b}	Kasi PKM
5	Ira Fitriana, S.Sos	Penata Muda Tk. I {III/b}	Kasi Trantib
6	M. Fachrizal	Pengatur {II/c}	Staf
7	Novi Yandra	Pengatur Tk. I {II/b}	Staf
8	Alam Syahputra	Pengatur Tk. I {II/b}	Staf
9	Nur Asia	Pengatur Muda {II/a}	Staf
10	Jumi		Staf
11	Arizal		Staf

Sumber: Kantor Lurah Perawang

Tabel diatas merupakan daftar pegawai seluruh pegawai kelurahan sesuai dengan pangkat dan golongan masing-masing pegawai. Selain itu, terdapat juga jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai di kelurahan perawang kecamatan tualang.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	1 Orang
2	Sarjana	4 Orang
3	D3	1 Orang
4	SMA	5 Orang
Jumlah		11 Orang

Sumber: Kantor Lurah Perawang

Tabel diatas merupakan data pegawai sesuai dengan tingkat pendidikan pegawai kelurahan dari pasca sarjana, sarjana, D3 dan SMA.

Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dapat dikatakan sangat baik apabila semua indikator yang ada di evaluasi perkembangan kelurahan khususnya bidang pemerintahan telah diimplementasikan seluruhnya. Namun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan perawang belum sepenuhnya

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sesuai dengan kebijakan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, hal ini dilihat dari beberapa fenomena yang penulis temukan, yaitu:

1. Pemerintahan kelurahan belum memiliki kelengkapan buku administrasi seperti buku administrasi pembangunan dan buku administrasi lainnya.
 2. Sarana Prasarana seperti Perpustakaan yang belum dimiliki oleh Pemerintah Kelurahan, kotak pengaduan masyarakat yang tidak dimanfaatkan serta masih terdapatnya gedung yang belum dikelola dengan baik, seperti gedung pertemuan yang terlihat lusuh. Sarana penunjang seperti komputer dibagian pelayanan hanya terdapat satu.
 3. Dalam perkembagannya kelurahan belum menerapkan *e-government*, seperti pemerintahan kelurahan belum mempunyai website kelurahan, belum memiliki Internet gratis (Wi-Fi), dan belum memiliki perpustakaan online.
 4. Selain itu kedisiplinan pegawai kelurahan juga masih kurang, berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa staff kelurahan yang terlambat saat jam kerja dan terdapat pula staff kelurahan yang pulang saat jam kerja, dan terdapat juga staff kelurahan yang tidak datang saat jam kerja.
- Dari fenomena yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Impelentasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan**



Pemerintahan (Studi di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak)”.
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka sebagian

rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan?
2. Apa Faktor penghambat implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan?

3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
2. Untuk mengetahui implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan serta menambah informasi dan wawasan yang lebih lengkap mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas terutama dalam dunia pendidikan.

2. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

3. Bagi Kelurahan Perawang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada kelurahan perawang agar dapat mengevaluasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kelurahan perawang

4. Bagi Uin Suska Riau

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang relevan khususnya mahasiswa Ilmu Administrasi Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membagi ke dalam enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, penelitian terdahulu, pandangan islam, definisi konsep, konsep operasional dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, informen penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisa data yang telah dikumpulkan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini meliputi sejarah, Visi dan Misi, struktur serta geografis Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini nantinya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2. Implementasi Kebijakan Publik

2.1 Pengertian Implementasi

Setiawan (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Nurdin Usman(2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Gaffar (2009: 295) implementasi merupakan salah satu proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil bagaimana yang diharapkan.

Menurut Susilo (2014: 149) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh induvidu, pejabat pemerintah maupun swasta.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses kebijakan yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu tindakan aktifitas atau kegiatan, baik individu, pejabat pemerintah maupun swasta sehingga akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

1.2 Pengertian Kebijakan

Menurut Frenndrich (2007: 20) memandang bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Adisasmita (2011: 77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparat pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tahir (2014: 23) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu ketentuan yang menjadi pedoman yang bertujuan untuk memperlancar jalannya sistem pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Agustino (2006:139) implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Nugroho (2003: 161) implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standart operating procedures*); c) koordinasi, pembagian tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Wahab (2001: 45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan yang memiliki keterkaitan dengan keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Tachjan (2006: 25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak dan makro yang menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau makro.

Tangklian (2003: 1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengelaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan dalam proses kegiatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administratif yang disetujui setelah kebijakan dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam diri seseorang yang menghendaki adanya suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang diinginkan untuk kepentingan bersama.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, salah satunya Teori George C. Edward, Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila Implementor

memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuatan kebijakan. Ketika Implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan Fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.2 Administrasi Publik

Administrasi publik berasal dari ilmu politik, yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Suradinata Dalam Sahya Anggara, 2012: 43).

Administrasi publik berperan dalam perumusan kebijakan negara. Nigro dan Nigro dalam Sahya Anggara (2012) mengatakan bahwa administrasi publik perannya sangat penting dalam perumusan kebijakan negara dan karena itu merupakan bagian dari proses politik (*public administration has an important role in the formulation of public policy and is thus part of the political process*).

Administrasi publik dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Para pakar administrasi menggunakan terminologi “*public policy*”, dengan istilah kebijakan publik dan kebijaksanaan publik. Istilah kebijakan mengarah pada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya peraturan perundangan dan keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitikberatkan pada fleksibilitas suatu kebijakan.

Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Gordon dalam Sahaya Anggara, 2012: 43). Hal tersebut memengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya mencakup analisis dan perumusan kebijakan (*policy analysis and formulation*), pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan (*policy implementation*) serta pengawasan dan penilaian hasil pelaksanaan kebijakan tersebut (*policy evaluation*) (Kasim dalam Sahaya Anggara, 2012: 44).

Chandler dan Plano dalam bukunya, *The Public Administration Dictionary* mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses mengimplementasikan kebijakan. Administrasi publik berfokus pada penegakkan hukum, proses pembuatan, dan penerapan peraturan, serta regulasinya dalam menyelenggarakan kebijakan publik. Tujuan administrasi publik bersifat nonprofit untuk kepentingan masyarakat. berbeda dengan administrasi *private* (swasta) yang berorientasi pada profit.

Administrasi publik terkait dengan lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penyelenggaraan

kepentingan publik. Komponen utama administrasi publik adalah organisasi, personalia, dan keuangan.

3. Administrasi Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Secara etimologi bersal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Defenisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu negara yang memiliki cara dan sistem yang berbeda-beda dengan tujuan agar negara tersebut dapat tertata dengan baik. Sedangkan menurut kosa kata, kata “Pemerintah” berasal dari kata *to govern, governeren, bestuuren*. Semuanya berarti mengatur. Dalam terminologi ini, pemerintah dapat mengatur karena mereka memiliki legitimasi dari rakyat berdasarkan amanat konstitusi. Jadi, pemerintah itu adalah mereka yang menjalankan konstitusi itu dengan cara mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya ada kewenangan mengatur. Sedangkan “Pemerintahan” bisaberarti dua hal. *Pertama*, dia bisa jadi merujuk pada kepemimpinan seseorang dalam pemerintah. *Kedua*, bisa juga berarti fungsi yang dijalankan pemerintah. Fungsi yang dijalankan pemerintah sendiri pada dasarnya adalah *konkretisasi* dari fungsi negara yaitu *beschikking* (mengurus), *regelling* (mengatur), dan *politie* (polisi/ keamanan ketertiban). (Muammar Alkadafi, 2018: 17).

Mengurus artinya segala kegiatan yang bersifat administratif dan teknis, rentangnya bisa dari pembuatan pelayanan sipil sampai pengelolaan sumber daya alam. Mengatur itu sebenarnya fungsi yang dilakukan legislatif, tapi

tidak menutup kemungkinan pemerintah juga membuat aturan sebagai penjelas peraturan yang dibuat oleh legislatif. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Daerah (Perda) dalam konteks daerah. Sedangkan, politie, merujuk pada peran negara memberikan ketentraman dan ketertiban (*Law and Order*) bagi rakyatnya. (Muammar Alkadafi, 2018: 17)

Tujuan Pemerintahan

Secara normatif, dari sisi yang lebih teknis, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah dibentuk untuk melayani atau sebagai pelayan masyarakat atau istilah yang lebih gagah adalah abdi negara. Sebagai abdi masyarakat atau abdi negara ini pejabat pemerintahan mendapat tugas antara lain menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemajuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. (Nawawi dalam Muammar Alkadafi 2018: 18).

Dari tujuan itu kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam bentuk rincian kegiatan dan sejumlah parameter atau ukuran keberhasilan atau kinerjanya.

Rasyid (Dalam Muammar Alkadafi, 2018: 18) menyebutkan tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuan bidang pelayanan. *Pertama*, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan. *Kedua*, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gonok-gonokan diantara

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga masyarakat, menjamin agar perubahan apa pun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. *Ketiga*, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga negara masyarakat tanpa membedakan status apa pun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. *Keempat*, melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintah, atau yang akan lebih bijak jika dikerjakan oleh pemerintah. *Kelima*, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo dan anak-anak terlantar. *Keenam*, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas. *Ketujuh*, menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Daerah adalah suatu wilayah otonom dalam konteks desentralisasi baik itu pemerintahan tingkat Provinsi maupun pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota, dan ada juga daerah yang diberi keistimewaan dari daerah-daerah lain di Indonesia seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan ada juga yang diberi status otonomi khusus yaitu Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua. Sehingga menurut Ni'matul Huda desentralisasi di Indonesia disebut "Desentralisasi Asimetris". (Ni'matul Huda dalam Muammar Alkadafi, 2018: 21-22).

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal didalamnya, yaitu *pertama* pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; *kedua*, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; *ketiga*, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. Kewenangan pemerintah daerah, meliputi kewenangan membuat peraturan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang diimbangi secara demokratis. Jadi pelaksanaan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari asas desentralisasi dan otonomi daerah.

2.3.1 Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Unsur pimpinan yaitu kepala desa

b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:

1. Sekretariat desa yaitu unsur staff atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;

2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.

3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemnagunan, dan kemasyarakatan. (Nurcholis, 2011: 74).

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina perekonomian desa;
- 7) Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif;

8) Mewakjili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa yang hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan.

Dapat dikatakan bahwa pemerintahan desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat publik (pemerintah) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan suatu organisasi publik. Dalam hal ini adalah pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah di desa, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam pengertian tentang desa, peneliti mengutip empat jenis Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Defenisi desa secara formal menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, pada Bab I, Pasal 1, huruf a adalah: “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satuan



masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya setelah zaman reformasi muncullah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dimana pada Bab I, Pasal 1 ayat huruf “O” disebutkan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”.

Pemerintah di zaman reformasi bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah masih kurang sempurna. Oleh karena itu pemerintah kembali membuat Undang-Undang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah. Dimana pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pada Bab I, Pasal 1 ayat 12 tersebut dinyatakan bahwa: ‘Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa memiliki ciri khas sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Desa memiliki kewenangan sempit;
 - b. Desa merupakan persekutuan lokal yang terdiri desa/dusun
 - c. Jumlah penduduk dan potensi tenaga pemimpin relatif lebih sedikit;
 - d. Desa memiliki kewenangan pemerintahan, pembinaan adat istiadat terpisah, tidak berada dalam satu tangan;
 - e. Desa tidak memiliki hak usul;
 - f. Pembangunan desa dibiayai oleh pemerintah berdasarkan subsidi melalui berbagai proyek dan lainnya kurang efektif dan efisien;
 - g. Pemerintahan desa masih tetap dibawah camat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat (1): “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai hal baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar kepada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan.

2.3.2 Pemerintahan Kelurahan

Menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kerja kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005

mengemukakan bahwa:

- a. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan;
- b. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota melalui camat;
- c. Lurah diangkat oleh Walikota/ Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil;
- d. Syarat-syarat Lurah meliputi:
 1. Perangkat/ golongan minimal penata (III/C)
 2. Masa kerja minimal 10 tahun
 3. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami keadaan sosial budaya masyarakat setempat

Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah kecamatan di daerah kabupaten/ kota, dapat berfungsi sebagai unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada Lurah, sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan camat.

Pemerintahan kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat di wilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat

dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan pembuatan KTP, Pencatatan akta tanah, penyuluhan masyarakat.

Pembentukan Kelurahan

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 tentang pembentukan daerah kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan;
- b. Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan dari beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran kelurahan dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih;
- c. Pembentukan kelurahan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan:
 1. Jumlah penduduk;
 2. Luas wilayah;
 3. Bagian wilayah kerja;
 4. Sarana dan prasarana pemerintah;
- d. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung;
- e. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah paling sedikit 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

Syarat-syarat pembentukan kelurahan menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan adalah:

- a. Jumlah penduduk;
 - Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK;
 - Wilayah Sumatra dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK;
 - Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Papua paling sedikit 900 jiwa atau 180 KK.
- b. Luas wilayah;
 1. Jawa dan Bali paling sedikit 3 Km²;
 2. Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 5 Km²;
 3. Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Papua paling sedikit 7 Km².
- c. Bagian wilayah kerja, wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
 - Memiliki kantor pemerintahan]
 - Memiliki jaringan perhubungna yang lancar
 - Sarana komunikasi yang memadai
 - Fasilitas umum yang memadai

Struktur organisasi kelurahan

- a. Kepala daerah
- b. Sekretaris kelurahan
- c. Kepala-kepala urusan, minimal 3 dan maksimal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kepala-kepala lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan

Kepala urusan minimal 3, yaitu:

- a. Urusan pemerintahan
- b. Urusan perekonomian dan pembnagunan
- c. Urusan keuangan dan urusan umum

Kepala urusan maksimal 5, yaitu:

- a. Urusan pemerintahan
- b. Urusan perekonomian dan perkembangan
- c. Urusan kesejahteraan rakyat
- d. Urusan keuangan
- e. Urusan umum

3.3 Perbedaan Desa dan Kelurahan

Sudirwo menyatakan bahwa salah satu tujuan diadakannya Undang-Undang tentang Pemerintah Desa adalah menyeragamkan pengaturan pemerintah desa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pemerintahan, pengawasan dan pembinaan desa-desa di seluruh Indonesia yang beraneka ragam, baik dalam susunan masyarakat terkecil. Tetapi dalam pola pola yang seragam tersebut masih dimungkinkan adanya kelainan-kelainan sepanjang tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Jadi, satuan organisasi pemerintahan terendah dibawah camat hanya ada dua macam yaitu desa dan kelurahan.

Nurcholis (2011: 2-3) menyatakan dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dibedakan dengan kelurahan. Desa mempunyai ciri perdesaan, sedangkan kelurahan berciri

perkotaan. Wilayah pedesaan adalah wilayah yang jauh dari pusat ibu kota,

Adapun wilayah perkotaan adalah wilayah yang berada di pusat ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten/kota dan sekitarnya.

Tabel 2.1 Perbedaan Desa dan Kelurahan

Perbedaan	Desa	Kelurahan
Definisi	Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan.
Otonomi	Ada, otonomi asli berdasarkan hak asal usul	Tidak ada, sekedar wilayah administrasi
Perangkat	Kepala desa dibantu Sekdes (PNS) dibantu perangkat desa yang lain. Kades dipilih dalam Pilkades. Kepala desa tidak digaji, ia mendapatkan imbalan berupa tanah bengkok, namun karena nilai tanah semakin menurun, kepala desa meminta tunjangan kepada negara	Lurah (PNS) yang dibantu staf kelurahan (PNS). Lurah diangkat oleh Bupati/ Walikota atas usul camat dari sebagai PNS mendapatkan gaji dan sesuai dengan pangkat golongan
Lembaga Perwakilan	Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif dengan kewenangan terbatas	Bukan lembaga perwakilan, tapi lembaga kemasyarakatan
Berada di Wilayah	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota
Pembentukan	Pembentukan desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk seperti untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 Jiwa atau 300 KK, Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 Jiwa atau 200 KK, wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 Jiwa atau 75 KK	Penduduk 2500-20000 jiwa. Terjangkau secara efektif. Memiliki sarana dan pelayanan yang memadai

Sumber: Arenawati, 2014 (69-70)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Good Governance

Konsep *Governance* bukanlah konsep baru, konsep *Governance* sama luasnya dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan tentang *good governance* dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin (Setyawan dalam Muslim dan Larbiel Hadi, 2017: 21) *governance* merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah *government*, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dsalam mengelola masalah-masalah kenegaraan.

Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan mereka. Menggunakan hak hukum, memneuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Governance sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana keputusan itu diimplementasikan, maka analisis *governance* difokuskan pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan. *Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *corporate governance*, *international governance*, *national governance* dan *local governance* (Mardiasmo dalam Larbiel Hadi, 2017: 21-24).

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Hsiang, 2012). Beberapa bentuk atau indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang perlu diperhatikan dan menjadi tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dianggap penting untuk kesejahteraan nasional atau biasa disebut *Good Governance* sesuai dengan kesepakatan dari PBB (perserikatan bangsa-bangsa) yang merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara. Baik dari tanggung jawab kewenangan ekonomi, administrasi, dan kewenangan politik yang dapat mengatur masalah sosial di negara tersebut. Dari tiga sektor kewenangan dari pemerintah kemudian digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat dalam tata kelola pemerintah yang baik akan menghindari kesalahan dalam alokasi dan dana pembangunan daerah termasuk penanggulangan dini tindak pidana korupsi.

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Definisi tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance*, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *Good Governance* tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Orientasi dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah:

1. Orientasi Ideal, yaitu negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti: legitimasi, akuntabilitas,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

securing of human rights, autonomy and devolution of power, dan juga assurance of civilian control.

Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif dan efisien dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Orientasi ini bergantung sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Nugroho mengemukakan bahwa sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa bukan rahasia lagi pada saat berurusan dengan birokrasi selalu identik dengan hal yang merepotkan, berbelit-belit, dan terkadang mengeluarkan biaya ekstra, serta praktik kolusi, korupsi dan nepotisme di tubuh pemerintahan. Gejala ketidakpercayaan publik itu yang memunculkan istilah *good governance* di Indonesia, hal ini dikarenakan tersumbatnya atau terbatasnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial terhadap pemerintah. Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan seperti yang dikemukakan Santosa (2008: 130), ada tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggaraan pemerintahan. Sektor swasta, dan masyarakat madani, maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tjokromidjojo dalam Sunarsono (2013: 172) mengemukakan *governance* artinya memerintah, menguasai dan mengurus. Proses

penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah/kepemerintahan). Sedangkan praktik terbaik disebut *good governance*. (kepemerintahan yang baik).

Dalam konsep *good governance* yang dikemukakan Nugroho adalah aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung jawab dan tanggung gugat tidak diberikan kepada atasan saja melainkan juga kepada para *stakeholders*, yakni masyarakat luas.

Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti *legitimacy* (apakah pemerintahan dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights*, *autonomy and devolution of power*, and *assurance of civilion control*, sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien. Dalam buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) menyatakan bahwa *good governance* secara tersirat maupun tersirat tertuang dalam tata nilai penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang meliputi prinsip-prinsip: supremasi hukum, keadilan, transparansi, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesional, cepat tanggap, efektif dan efisien, berdaya saing, dan akuntabel.

Menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (dalam Muslim dan Larbiel Hadi, 2017: 22) menyebutkan *good governnace* adalah suatu konsep dalam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. Sementara UNDP mendefenisikan sebagai “*The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels*”. Dari pengertian tersebut, secara fungsional aspek-aspek *good governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi in efisiensi. Governance mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu:

- a. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitas terhadap *equity, poverty* dan *quality of live*.
- b. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
- c. *Admionistrative governance* adsalah sistem implementasi proses kebijakan.

2.4.1 Unsur-Unsur *Good Governance*

Ada tiga unsur *Godd Governance* menurut (Sedarmayanti, 2012: 281), yaitu:

1. Negara/ Pemerintah: Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pada sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti Industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat Madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, ekonomi.

Negara, sebagai salah satu unsur governance, didalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. **Sektor Swasta**, meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidag dan sektor informal lain dipasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. namun, sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karna mempunyai pengaruh terhadap kebijakan sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun informal. **Society**, meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

2.4.2 Prinsip Good Governance

Menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah:

1. Kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perumdam-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaran negara.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tertib penyelenggara negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
7. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asas efesiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. Asas efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

10. Asas keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara

Hsiang, (2012), Beberapa bentuk atau indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang perlu diperhatikan dan menjadi tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dianggap penting untuk kesejahteraan nasional atau biasa disebut *Good Governance* sesuai dengan kesepakatan dari PBB (perserikatan bangsa-bangsa) yang merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara. Baik dari tanggung jawab kewenangan ekonomi, administrasi, dan kewenangan politik yang dapat mengatur masalah sosial di negara tersebut. Dari tiga sektorkewennagan dari pemerintah kemudian digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat dalam tata kelola pemerintah yang baik akan menghindari kesalahan dalam alokasi dan dana pembangunan daerah termasuk penanggulangan dini tindak pidana korupsi.

Disamping itu, pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan *good governance* juga memiliki beberapa indikator yang digolongkan menjadi 4 bagian dalam pengukuran tata kelola pemerintahan yang diantaranya tersebut adalah:

1. Transparansi

Transparansi dianggap sebagai cara untuk membuka berbagai hal dari aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk mengawasi setiap aktivitas pemerintah dengan mudah. Konsep transparansi adalah suatu proses

keterbukaan dalam menyampaikan suatu informasi atau aktifitas yang dilakukan dengan tujuan agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung dapat ikut bertanggung jawab dalam memberikan pengawasan dan memfasilitasi semua akses informasi yang menjadi faktor utama terciptanya transparansi ini.

Partisipasi

Partisipasi merupakan bersifat membngun pada kepentingan dalam merencanakan suatu kebijakan. Membantu memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan atau membandingkan antara berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif untuk menyelesaikan suatu persoalan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban atas peraturan yang telah dibuat sekaligus menguji kualitas seorang pemimpin atau suatu kebijakan yang tidak berpihak engan golongan tertentu.

4. Koordinasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang dapat memastikan bahwa seluruh kebijakan yang disepakati, memiliki kepentingan bersama dan juga telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan itu dapat terwujud dengan cara mengintegrasikan visi dan misi pada suatu masing-masing lembaga.

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi lain, dari satu pakar ke pakar yang lainnya. Namun paling tidak terdapat 5 (lima) unsur utama atau indikator

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus dipenuhi dan dituntut untuk terbentuknya *good governance*.

(Utomo, 2012: 186). Indikator tersebut adalah:

1. Rule of Law
2. Akuntabilitas
3. Transparan
4. Profesionalisme
5. Participation

2.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Kelurahan

Evaluasi perkembangan kelurahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektifitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Insrtnumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

1. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektifitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Idealnya pemerintahan yang baik dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan pada pasal 8, yang juga menjadi indikator penilaian suatu perkembangan desa dan kelurahan yang terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu:

1. Bidang pemerintahan desa dan kelurahan, meliputi aspek:
 - a. Pemerintahan;
 - b. Kinerja;
 - c. Inisiatif dan kreatifitas dalam pemberdayaan masyarakat;
 - d. Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/ *E-Government*; dan
 - e. Pelestarian adat dan budaya.
2. Bidang Kewilayahan desa dan kelurahan, meliputi aspek:
 - Identitas;
 - Batas;
 - Inovasi;
 - Tanggap dan siaga bencana;
 - Pengaturan investasi.
3. Bidang Kemasyarakatan
 - Partisipasi masyarakat;
 - Lembaga kemasyarakatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

Keamanan dan ketertiban;

Pendidikan;

Kesehatan;

Ekonomi;

Penanggulangan kemiskinan;

Peningkatan kapasitas masyarakat

Untuk melihat bagaimana perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka penulis berfokus pada indikator di bidang pemerintahan. Dimana indikator penyelenggaraan pemerintahan ialah:

a. Pemerintahan;

Pemerintahan dalam arti sempit adalah organ/ alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan Undang-Undang. Dalam Pengertian ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif (Eksekutif atau Bestuur). Sedangkan dalam arti luas pemerintah merupakan semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan dalam negara baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif. Jadi semua pemegang kekuasaan di dalam negara. (SF.Marbun dan Moh. Mahfud, 2010: 8)

b. Kinerja;

Kinerja dalam bahasa indonesia dengan kata dasarnya adalah "kerja" diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai atau prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja dari kemampuan seseorang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Bangun (2012: 231) kinerja adalah hasil kerja pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Sedangkan menurut Hasibuan (2010) kinerja (prestasi kerja) adalah suatu kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu.

- c. Inisiatif dan kreatifitas dalam pemberdayaan masyarakat;

Inisiatif adalah kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu, mampu menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar, berusaha untuk terus bergerak untuk melakukan beberapa hal walau keadaan terasa semakin sulit. Dan Kreatifitas adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk menciptakan ide-ide asli/ adaptif fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang.

- d. Desa dan Kelurahan berbasis teknologi informasi/ *E-Government*; dan

Budi Rianto dkk (dalam Muslim dan Larbiel Hadi, 2019: 26) menyimpulkan bahwa *E-Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Government* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan

hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antar pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.

Pelestarian adat dan budaya.

Pelestarian adat dan budaya merupakan upaya perlindungan dan pemanfaatan adat dan budaya yang dinamis.

Kelima indikator diatas merupakan tolak ukur yang dinilai untuk melihat apakah kelurahan dapat dikatakan berkembang atau pun tidak, sehingga dengan status perkembangan kelurahan tersebut dapat diidentifikasi bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sudah dikatakan baik atau ideal.

2.6 Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten/ kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Sebagai unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa organisasi kelurahan sebagai

unsur pelaksana teknis kewilayah dalam wilayah kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut lurah memiliki fungsi (1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; (2) pemberdayaan masyarakat, (3) pelayanan masyarakat; (4) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (5) pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum.

Demi kelancaran pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan maka dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam lingkup kelurahan. Selain itu untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kelurahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku, oleh sebab itu maka pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota dan camat melakukan pengawasan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran umum dalam kerangka berfikir, disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1	Anita Rusdiani	2018	Analisis Keberhasilan Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak Dalam Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tahun 2017 Di Provinsi Riau	Keberhasilan Kelurahan Minas Jaya tidak lepas dari faktor kepemimpinan, administrasi pemerintahan kelurahan serta partisipasi masyarakat. dan juga faktor pendukung yaitu perhatian pemerintah daerah Kabupaten Siak serta modal sosial.
2	Abdul Akhfar	2019	Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Studi Pada Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa belum berjalan dengan baik dimana ada beberapa buku administrasi yang tidak diterapkan dan tidak lengkapnya pengisian beberapa buku administrasi desa b
3	Wulan Krismiati Ningsih	2020	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Di Kabupaten Asahan	Hasil penelitian ini adalah bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi kependudukan secara daring di kabupaten asahan sudah sesuai dengan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah dibahas di atas ialah penulis lebih menekankan pada Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, dan sesuai dengan indikator yang penulis ambil dari Permendagri tersebut terkhususnya pada bidang pemerintahan dimana terdapat 5 indikator yaitu: Pemerintahan, Kinerja, Inisiatif dan kreatifitas dalam pemberdayaan masyarakat, desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/ E-Government, dan pelestarian adat dan budaya.

2.8 Pandangan Islam

Agama islam yang bedasarkan Al-Qur'an dan Hadits sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur umat dalam memberikan tuntunan dan masalah yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemeritahan. Terdapat tiga kunci bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1. Dalam Surat An-Nisa' Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surah ini kata kuncinya ialah taat. Taat disini diperuntukkan tidak hanya untuk Jundiyah (bawahan/ staf) saja melainkan untuk semua Jundiyah hingga Qiyadah. Taatnya kepada siapa saja, diayat tersebut taat bagi dibagi menjadi tiga: Allah, Rasul dan Ulil Amri.

Umat islam harus taat kepada Allah dan Rasul, sedang pada ulil amri harus melihat dulu seperti apa dia (ketaatan pada Allah dan Rasul) bila tidak taat (mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan aturan Allah) maka umat islam tidak diperkenankan untuk menaatinya.

2. Surah An-Nisa Ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Pada Ayat ini kata kuncinya ialah amanah. Syarat amanah sendiri yaitu beriman, orang yang beriman mesti amanah. Di dalam pemerintahan sikap amanah ini harus dapat dimiliki oleh setiap penyelenggara pemerintah. Amanah disini artinya semua manusia harus bertanggungjawab atas apa yang telah menjadi tugasnya dimuka bumi ini. Disinilah letak amanah berfungsi sebagai kenyamanan, karena akan memberikan keamanan bagi umat manusia walaupun dengan beragam agama.

3. Surah As-Syuro' ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ



Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

Katak kunci selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut islam yakni syuro' atau musyawarah. Dalam segala urusan Allah SWT memerintahkan untuk dimusyawarahkan dalam memutuskan perkaranya. Jika dengan konsep musyawarah ini akan ada berbagai gagasan, pemikiran dan wawasan dari masing-masing agar tercapainya sebuah mufakat. Yang mana itu akan meminimalisir timbulnya keputusan yang otoriter (menyebabkan ketimpangan).

Itulah 3 kata kunci konsep penyelenggaraan pemerintahan dalam islam yaitu: Taat, Amanah, dan Musyawarah (Syuro')

3.9 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan pokok batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan pada bagian berikutnya, yaitu dengan mendefenisikan sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan suatu proses kebijakan yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu tindakan aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Adapun batasan yang dimaksud

dalam penelitian adalah implementasi mengenai permendagri nomor 81 tahun 2015.

Kebijakan adalah suatu ketentuan yang menjadi pedoman yang bertujuan untuk memperlancar jalannya sistem pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan yang dimaksud pada penelitian ini ialah tentang penyelenggaraan pemerintahan.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan dijalankan.
4. Evaluasi Perkembangan kelurahan adalah upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan dimana kelurahan yang dimaksud disini adalah kelurahan yang telah melaksanakan evaluasi perkembangan

10 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang di dasarkan atas sifat-sifat yang didefenisikan yang dapat diamati (observasi) sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.

Tabel 2.3 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ditinjau dari Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Pemerintahan	1. Sarana dan Prasarana 2. Akuntabilitas 3. Administrasi
	Kinerja	1. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat 2. Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat 3. Pembinaan masyarakat 4. Budaya kerja
	Inisiatif dan Kreatifitas	1. Visi dan Misi pemberdayaan Masyarakat 2. Kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat 3. Eksistensi institusi pemberdayaan masyarakat dan aparatur



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketersediaan Sistem Teknologi Informasi berbasis internet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sistem teknologi informasi berbasis internet 2. Perangkat komputer 3. Administrasi
Pelestarian Adat dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan partisipasi masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya 2. Keterlibatan kelembagaan adat dalam pelestarian adat dan budaya 3. Pembinaan seni budaya setempat 4. Kebijakan menjaga kelestarian adat 5. Alokasi anggaran pelestarian adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan

1.11 Kerangka Pemikir

Kerangka pemikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur penelitian dalam memberikan penjelasan kepada orang lain. Dan untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikir

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan



Indikator Pengukuran

1. Pemerintahan
2. Kinerja
3. Inisiatif Dan Kreatifitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat
4. E-Government
5. Pelestarian Adat dan Budaya



Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dari obyek yang diteliti guna memperoleh data yang akurat. Untuk memperoleh data yang akurat atau mendekati yang sebenarnya sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis memilih dan menetapkan lokasi penelitian di Kantor Kelurahan Perawang di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, beralamat Jalan A.R Hakim, Kecamatan Tualang. Penelitian ini dilaksanakan mulai Desember 2020 s/d Selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan adalah jenis data kualitatif. Dengan mengumpulkan beberapa keterangan-keterangan sebanyak mungkin yang kemudian di interpretasikan sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berkualitas. Dalam buku sugiyono (2010: 14) data kualitatif adalah data yang berbentuk data, kalimat, skema dan gambar, yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari informasi.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Adapun jenis sumber data yang digunakan ialah:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Penulis memperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara terstruktur. Selain itu observasi atau pengamatan juga dapat dijadikan sebagai data primer karena kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi yang dilakukan berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjau dari Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah atau data yang tersedia baik itu dari jurnal, skripsi, undang-undang yang ada untuk mencari konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh melalui instansi pemerintahan yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, dokumentasi dan lain-lain sebagai bukti bahwa penelitian ini benar dilakukan.

3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2004: 145) subjek penelitian adalah subjek yang diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta lapangan. Berdasarkan



penjelasan tersebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis individu dan organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian.

Selanjutnya penentuan informan penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010: 96) bahwa, teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang paling kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

Adapun Informan Penelitian meliputi:

Tabel 3.1 Informen Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jabatan	Jumlah
1	Nanang Suhendra, S.STP	Lurah	1 Orang
2	Suhartati, S.Sos	Sekretaris Lurah	1 Orang
3	Nur' Aisyah, S.Sos	Kasi Pemerintahan	1 Orang
4	Sudirman, S.H	Kasi PKM	1 orang
5	Jumi	Staff	1 Orang
7	Masyarakat	-	5 Orang
Jumlah			10 Orang

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Menurut Harbani Pasolog (2013: 131) observasi adalah pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan, dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lapangan, bertemu dan berinteraksi dengan subjek penelitian untuk dapat mengetahui peranan mereka dalam melaksanakan fungsi peberdayaan masyarakat. Peneliti dapat menggali data lebih valid dan akurat dalam arti bahwa peneliti secara cermat dapat mengamati bagaimana mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan., Dapat menggunakan lembaran observasi yang disiapkan.

b. Wawancara

Menurut Harbani Pasolog (2013: 137) wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak-pihak terkait dan berhadapan langsung dengan narasumber yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan.

c. Dokumentasi

Juliansyah Noor (2011: 141) menyebutkan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat umum data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dokumen yang dimaksud berupa segala hal mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan.

3.5 Teknik Analisa Data

Sugiyono (2012: 235) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012: 237) adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsrtrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan penulis adalah analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan cara demikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian data

Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Peneliti melakukan pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada proses reduksi data. Pengecekan tersebut di data yang digunakan dapat memungkinkan untuk diadakannya suatu kesimpulan.



c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mencari makna dari kata yang dikumpulkan. Akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan penyajian data yang ada. Uraian hasil penelitian dirangkum dalam suatu keterangan mengenai hasil penelitian tersebut. Keterangan tersebut adalah hasil pengecekan ulang tentang fenomena di lapangan yang terjadi, setelah dibandingkan dengan teori yang ada diadakannya suatu penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Kelurahan Perawang

Terbentuknya kelurahan Perawang sebagai sebuah institusi yang berperan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Siak, yang bermanfaat untuk mempermudah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Nomor 39 Tahun 2002.

Kelurahan Perawang sebelum menjadi kelurahan merupakan sebuah Desa yang bernama Desa Tualang yang kemudian untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam pelayanan maka dibentuklah sebuah daerah yang berstatuskan Kelurahan yang kemudian diberi dengan nama Kelurahan Perawang pada tahun 2002. Adapun dasar pembentukan Kelurahan Perawang ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 39 Tahun 2002 tentang pembentukan Kelurahan Minas Jaya (Kecamatan Minas), Kelurahan Telaga Sam Sam (Kecamatan Kandis), Kelurahan Kandis Kota (Kecamatan Kandis) dan Kelurahan Perawang (Kecamatan Tualang) pada tanggal 20 September 2002.

4.2 Visi Misi Kelurahan Perawang

Pemerintah Kelurahan Perawang sebagai sebuah lembaga yang ingin bekerja dengan baik kedepannya. Maka Kelurahan Perawang haruslah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempunyai visi dan misi yang jelas. Adapun visi dan misi kelurahan perawang adalah:

Visi

“TERWUJUDNYA KANTOR LURAH PERAWANG SEBAGAI TEMPAT PELAYANAN TERBAIK SE- KABUPATEN SIAK”

Misi

1. Meningkatkan etos kerja dan disiplin pegawainya.
2. Menumbuhkan gairah dan semangat berkarya bagi perangkat Kelurahan.
3. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan Perawang.

4.3 Profil Kelurahan Perawang

1. Nama Kelurahan : Perawang
2. Tahun Pembentukan : 20 September 2002
3. Dasar Hukum Pembentukan : Perda Kabupaten Siak No. 39 Tahun 2002
4. Nomor Kode Wilayah : 1408041001
5. Nomor Kode Pos : 28772
6. Kecamatan : Tualang
7. Kabupaten : Siak
8. Provinsi : Riau
9. Negara : Indonesia

Kelurahan Perawang merupakan satu-satunya Kelurahan yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dan selebihnya di Kecamatan Tualang itu daerahnya berstatuskan Desa. Dengan tugas menjalankan roda pemerintahan tingkat kelurahan dan pemberdayaan serta pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Yarif Ka'im Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kecamatan Tualang serta Pemerintah Kabupaten Siak. Keberadaan Kelurahan Perawang saat ini dipimpin oleh seorang lurah yang bernama Nanang Suhendar, S.STP. Lurah Perawang dibantu beberapa aparat kelurahan yang terdiri dari Sekretaris Lurah, Bendahara Lurah, Kepala Bidang, Ketua Lingkungan, Ketua RW, Ketua RT. Adapun Kelurahan Perawang ini terdiri dari 3 Lingkungan, 8 RW dan 91 RT.

Adapun daerah yang menjadi batas-batas wilayah dari Kelurahan Perawang itu sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batas – Batas Wilayah Kelurahan Perawang

NO	ARAH	BATAS WILAYAH		
		DESA/KELURAHAN	KEC	KAB/KOTA
1	Timur	Tualang	Tualang	Siak
2	Selatan	Maredan Barat dan Sungai Ukai	Tualang dan Rumbai	Siak dan Pekanbaru
3	Barat	Perawang Barat	Tualang	Siak
4	Utara	Pinang Sebatang Barat dan Pinang Sebatang Timur	Tualang	Siak

Sumber: Kantor Lurah Perawang

Adapun penjelasan dari tabel diatas yakni:

- Batas Sebelah Timur : Desa Tualang (Kecamatan Tualang dan Desa Pinang Sebatang (Kecamatan Tualang)
- Batas Sebelah Barat : Desa Perawang Barat (Kecamatan Tualang)
- Batas Sebelah Utara : Desa Pinang Sebatang Barat (Kecamatan Tualang) dan Desa Sebatang Timur (Kecamatan Tualang)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Batas Sebelah Selatan : Desa Maredan Barat (Kecamatan Tualang) dan Kelurahan Sungai Ukai (Kecamatan Rumbai)

Adapun Jarak dari Kelurahan dengan pusat Pemerintahan, tersaji dalam table di bawah ini:

Tabel 4.2 Jarak dari Kelurahan ke Pusat Pemerintahan

NO	TUJUAN	JAUAH JARAK
1	Ke Pemerintahan Kecamatan	7 Km
2	Ke Pemerintahan Kabupaten	70 Km
3	Ke Pemerintahan Provinsi	70 Km

Adapun jarak dari Kelurahan Perawang ke Kantor Camat Tualang sebagi pusat Kecamatan di Kecamatan Tualang yakni sejauh 7 km. Lalu jarak antara Kelurahan Perawang dengan Kota Siak Sri Indrapura sebagai Ibukota Kabupaten Siak yakni sejauh 70 Km. Dan sejauh 70 Km pula jarak antara Kelurahan Perawang dengan kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau.

4 Struktur Kepengurusan Di Kelurahan Perawang

4.1 Struktur Pemerintahan Kelurahan Perawang

Struktur organisasi adalah suatu kerangka dasar yang menunjukkan dengan jelas hubungan antar bidang yang satu dengan bidang yang lain.

Berikut struktur organisasi kelurahan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

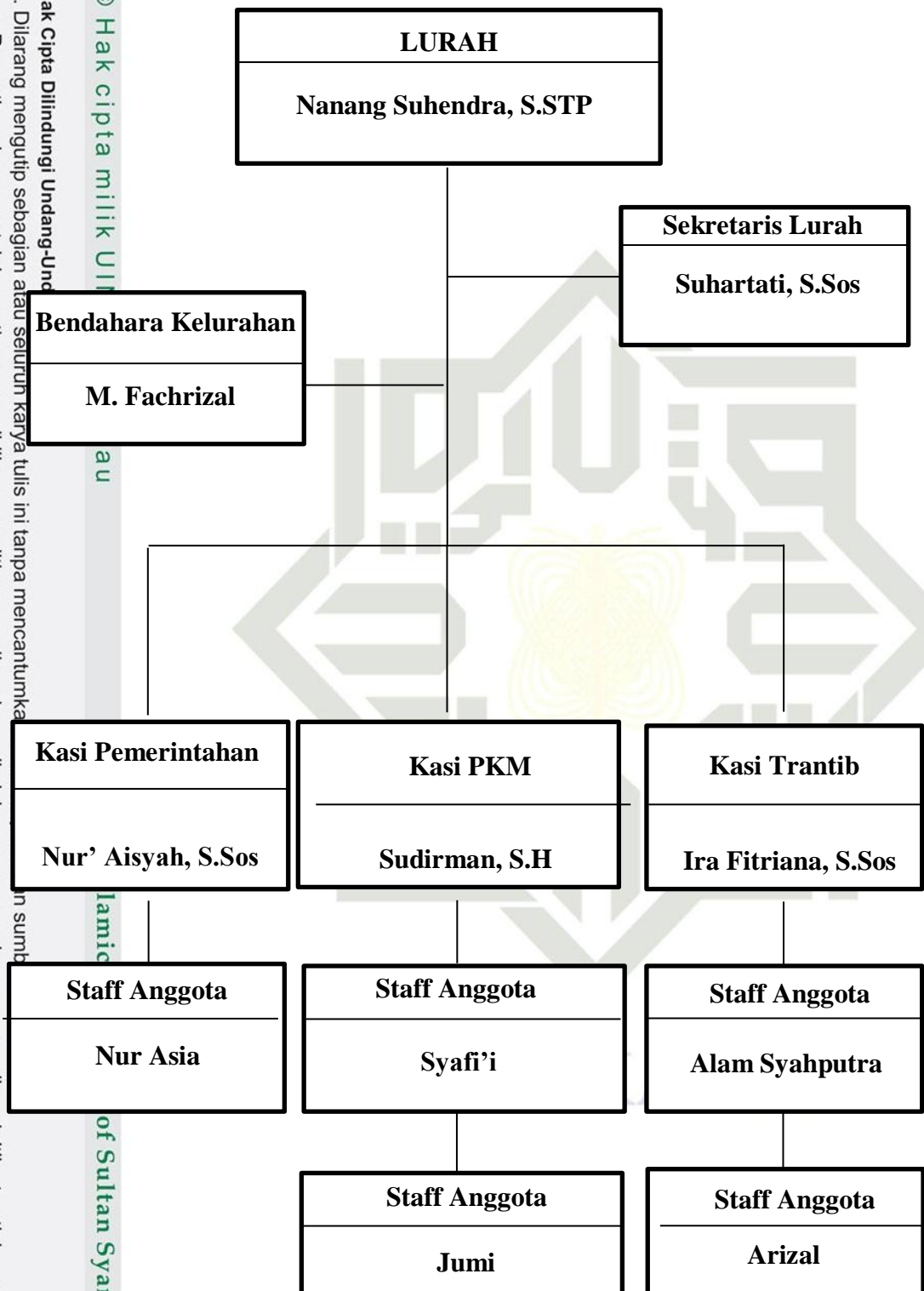
© Hak cipta milik UIN

au

lamia

of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Perawang





4.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan adalah sebagai berikut:

a. Lurah

Tugas pokok Lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, sedangkan fungsi Lurah adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan
2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan
3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

b. Sekretaris Lurah

Adapun tugas pokok sekretaris lurah adalah membantu lurah melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi sekretaris lurah adalah sebagai berikut:

- Pengkoordinasian pelaksanaan dan tugas fungsi lurah
- Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh lurah
- Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian

Pengelolaan administrasi keuangan, dan

Pelaksanaan urusan perlengkapan kerumahtanggaan kelurahan

c. Seksi Pemerintahan

Adapun tugas pokok pada bidang pemerintaha adalah membantu lurah melaksanakan pembinaan pemerintahan kelurahan dan pembinaan rukun warga.

Fungsi bidang pemerintahan adalah:

Penyusunan program dan kegiatan pemerintahan kelurahan;

2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kelurahan;

3. Pemberian pelayanan kepada masyarakatdi bidang pemerintahan, dan

4. Pengumpulan dan pengolahan dan administrasi pemerintahan.

d. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Adapun tugas pokok seksi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat adalah membantu lurah dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi seksi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

Penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;

Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;

Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengkoordinasian upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat; Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat, dan
- Pelaksanaan pemberian pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Adapun tugas pokok seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah membantu lurah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan perlindungan masyarakat.

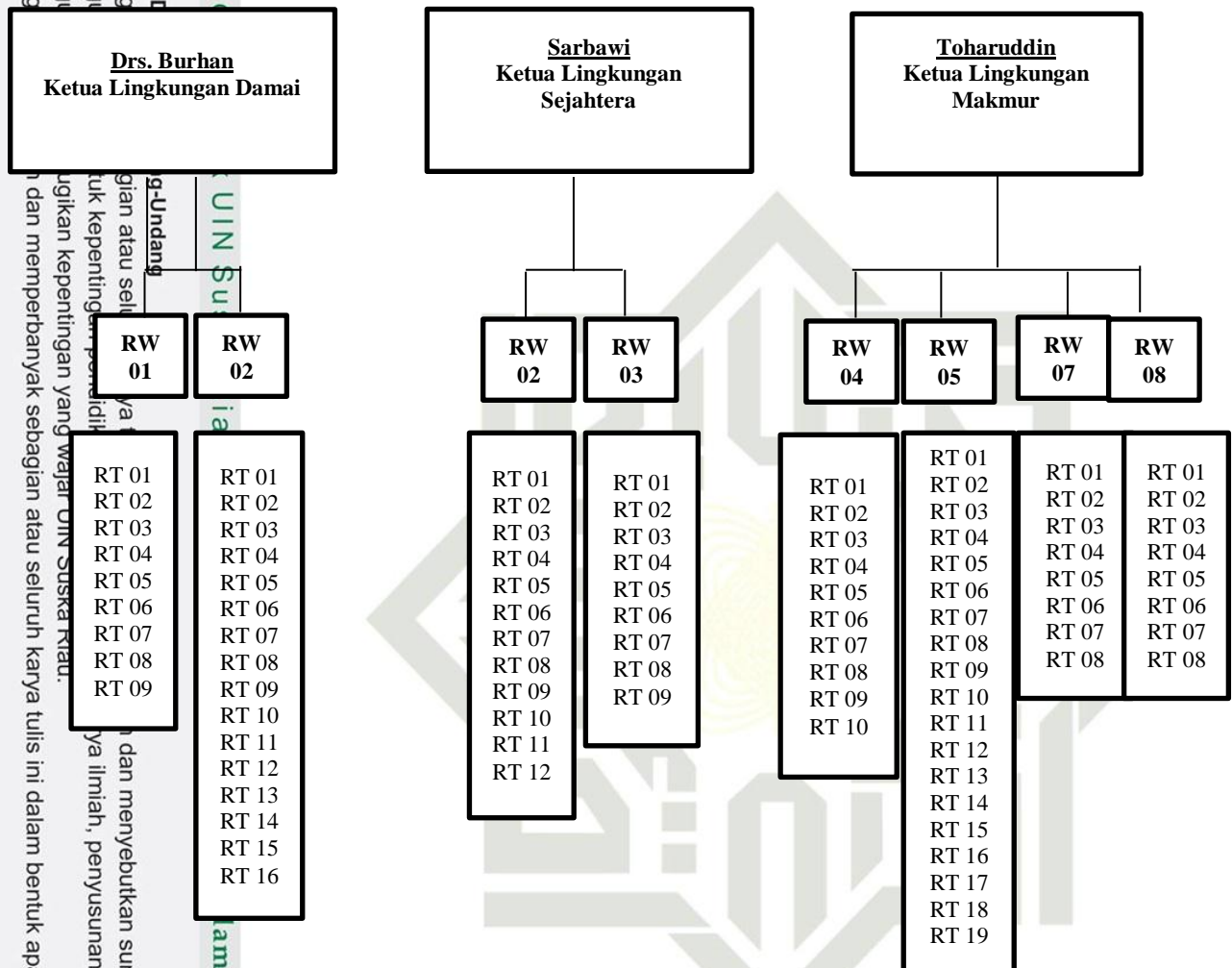
Fungsi seksi ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusn kepala daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya di kelurahan;
- Pelaksanaan, pembinaan, dan perlindungan kepada masyarakat dan anggota LIMNAS di kelurahan;
- Pelaksanaan penertiban terhadap gngguan sosial, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



4.4.3 Struktur Lingkungan, RT, dan RW di Wilayah Kelurahan Perawang

Gambar 4.2 Struktur Lingkungan, RW dan RT di Wilayah Kelurahan



Di kelurahan Perawang terdiri dari 3 Lingkungan yakni Lingkungan Damai, Lingkungan Sejahtera, dan Lingkungan Makmur. Dimana Lingkungan Damai terdiri dari 2 RW, yakni RW 01 dan RW 06 yang terdiri dari 25 RT. Lalu di Lingkungan Sejahtera ada 2 RW yakni RW 02 dan RW 03 yang terdiri dari 21 RT. Dan yang terakhir adalah Lingkungan Makmur yang terdiri dari 4 RW yakni RW 04, RW 05, RW 07, RW 08 yang mana total RT nya berjumlah 45 RT.



4.5 Geografis Kelurahan Perawang

Tabel 4.3
Jarak Geografis Kelurahan Perawang

No	Lokasi Tempat Tujuan	Jarak
1	Kekantor polisi (polsek)/ kantor koramil	0,3 km
2	Kepasar	0,8 km
3	Kesungai	5 km
4	Keterminal bus	5 km
5	Kepelabuhan	5 km
6	Kebandara	80 km
7	Kepabrik	3 km
8	Ketempat wisata	70 km
9	Keperbatasan kabupaten	45 km
10	Keperbatasan provinsi	357 km

Letak kelurahan perawang yang sangat strategis yakni berada di tengah-tengah kecamatan tualang menjadikan kelurahan perawang sangat mudah dijangkau ke beberapa tempat diantaranya seperti ke kantor polisi sejauh 0,3 km, jarak ke pasar 0,8 km, jarak ke terminal bus 5 km, lalu jarak ke pelabuhan 5 km, bandara 80 km, kemudian jarak ke pabrik industri 3 km, lalu jarak ke tempat wisata sejauh 70 km, dan jarak ke perbatasan kabupaten 40 km, kemudian jarak ke perbatasan provinsi 357 km, serta jarak ke laut sejauh 150 km.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan maka pada bab ini peneliti menarik kesimpulan bahwasannya hasil penelitian yang dilakukan terkait Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak) belum sepenuhnya sesuai dengan permendagri tersebut. Kelurahan Perawang pada bidang pemerintahan cukup berkembang sehingga penyelenggaraan pemerintahan kelurahan perawang dapat dikatakan cukup baik. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa Sub Indikator pada Indikator dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang masih belum terpenuhi, yaitu:

1. Pemerintahan, pada indikator pemerintahan yang memiliki 3 sub indikator yaitu Sarana dan Prasarana, Akuntabilitas, dan Administrasi sudah hampir terpenuhi seluruhnya. Hanya Satu Sarana dan Prasarana yang belum Terpenuhi Yaitu Perpustakaan yang belum dimiliki oleh Kelurahan Perawang dan sebagai gantinya kelurahan perawang menyediakan sudut baca bagi masyarakat dan begitupun juga dengan akuntabilitas dimana tidak ada kotak pengaduan suara serta laporan pertanggungjawaban yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang transparan dan masih kurang lengkapnya buku administrasi yang ada.

2. Kinerja yang memiliki 4 sub indikator penilaian yaitu, Strategi dalam Pemberdayaan Masyarakat, Kebijakan Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat, dan Budaya Kerja. Pada indikator kinerja sudah dapat dikatakan cukup baik, karena masih adanya terdapat beberapa sub indikator yang belum terpenuhi, yaitu fasilitasi dalam pemasaran produk unggulan, tidak adanya regulasi dalam pemberdayaan masyarakat dan reward bagi perangkat ataupun masyarakat.
3. Inisiatif dan Kreatifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan sub indikator yang diketahui bahwa tidak ada satu pun sub indikator yang terpenuhi hal ini dilihat dari visi misi dan kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat serta eksistensi institusi yang tidak ada. Sehingga pada indikator ini kelurahan perawang belum memenuhi kriteria pada permendagri tersebut.
4. Kelurahan Berbasis Teknologi/ *E-Government*, memiliki 3 Sub Indikator dan masih terdapat sub indikator yang belum terpenuhi oleh pemerintah kelurahan perawang. Seperti, website kelurahan, tokoh pemuda teknopreneur, perpustakaan online, dan internet gratis, administrasi berbasis teknologi serta perangkat yang mengelola teknologi informasi yang belum dimiliki oleh Kelurahan Perawang.
5. Pelestarian Adat dan Budaya yang memiliki 5 sub indikator dan hanya 1 sub indikator yang belum terpenuhi. Pemerintah kelurahan dan masyarakat sudah melakukan pembinaan terhadap pelestarian adat dan budaya. Hanya saja aplikasi anggaran pelestarian adat yang belum ada.



6.1.2 Hambatan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

Adapun hambatan atau kendala yang ditemukan di Kelurahan Perawang dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Perawang menurut teori George C. Edward, Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) yaitu:

1. Komunikasi, pemerintah kelurahan belum melakukan sosialisai mengenai permendagri nomor 81 tahun 2015.
2. Sumber daya, staff kelurahan belum memadai serta kurangnya perlengkapan kerja seperti komputer.
3. Disposisi, komitmen serta etos kerja staff desa masih kurang karena mempunyai profesi lain diluar tanggungjawabnya menjadi staff kelurahan.
4. Struktuk Birokrasi, belum terdapatnya SOP yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari belum terintegrasinya pembinaan serta pengawasan.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat hambatan dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan perawang kecamatan tualang kabupaten siak. maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kelurahan perawang harus melakukan sosialisasi atau pembinaan mengenai permendagri nomor 81 tahun 2015 serta melakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan terhadap seluruh pegawai mengenai permendagri ini dan pegawai harus mengikutinya.

Pemerintah kelurahan perawang harus dapat memahami mengenai peraturan menteri dalam negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama lurah harus dapat memotivasi masyarakat agar mau ikut serta dalam setiap kegiatan yang diadakan kelurahan perawang, seperti memberikan reward (penghargaan) pada masyarakat, perangkat masyarakat ataupun kelompok masyarakat karena dengan adanya bentuk reward ini akan memotivasi masyarakat sehingga masyarakat bersemangat dalam mengikuti kegiatan pemerintah.

3. Aparatur kelurahan harus profesional dalam melaksanakan tugasnya, dan mampu bersikap disiplin serta meningkatkan etos kerjanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Press.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alkadafi, Muammar. *Administrasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pekanbaru: Graha Firdaus
- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Friendrich, Carl. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Guntur, Setiawan. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasibuan, M. P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. : Bumi Aksara
- Maryani Dedeh dan Ruth Roselin Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: Cv. Budi Utama.
- Muslim dan Larbiel Hadi. 2019. *Pelayanan Publik Konsep, Inovasi, & Semangat Anti Korupsi*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi.
- Mugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo.
- Murdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pasolog, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sentosa, Panji. 2010. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance "Kepemirintahan Yang Baik Bagian Pertama Edisi Revisi"*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Suf Mansur dan Moh. Mahfud. MD. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Susilo, Muhammad Joko. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Persiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Taichjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. APII Bandung-Paslit Lemlit Umpad.

Tangkilisan, Hasel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.

Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

JURNAL

Abdhuil Akhfar. 2019. *Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Studi Pada Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: Skripsi Ilmu Administrasi Negara.

Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Endah Wahyu Utami dan Widi Nugrahaningsih. 2017. *Penerapan Good Governance Di Kelurahan Manahan Kecamatan BanjarSari Surakarta*. Surakarta: Jurnal Ekonomi dan Perbankan. Vol. 2, No. 1.

Isnaini, AgustinFauziah,dkk. 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kelurahan Di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolngo*. Jurnal Akuntansi.

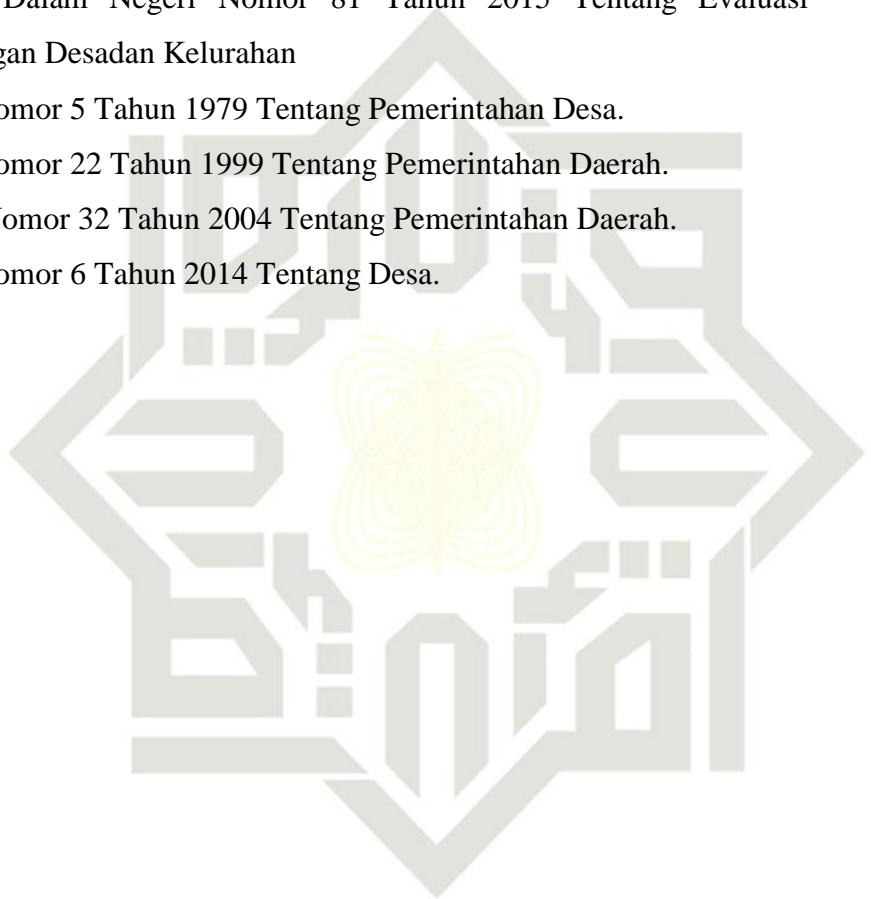
Rosyada, Ayu Amrina. 2016. *Analisis Penerapan Prinsip Good Governnace Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Smarinda*. Samrinda: Jurnal Ilpu Pemerintahan. Vol. 4, No. 1.

Suhardi. 2016. *Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa)*. Jurnal. Fisipol.



LAINNYA

1. Al-Qur'an dan Terjemahannya
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan
3. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi
Perkembangan Desadan Kelurahan
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



DAFTAR OBSERVASI

Pemerintahan

No	Sub Indikator	Ada	Tidak
1	Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> a. Gedung Kantor b. Gedung Pertemuan c. Perangkat Kelurahan d. Struktur Organisasi e. Jaringan Listrik f. Sumber Daya Listrik g. Perpustakaan 		
2	Akuntabilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Kotak Pengaduan Suara Masyarakat 		
3	Administrasi <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Kinerja Tahunan b. Laporan Tahunan Lurah c. Buku Registrasi Pelayanan d. Buku Profil Kelurahan e. Buku Administrasi Umum f. Buku Administrasi Kependudukan g. Buku Administrasi Keuangan h. Buku Administrasi Pembangunan i. Buku Administrasi Lainnya j. Kartu Uraian Tugas k. Peta Wilayah Kelurahan l. Peta Batas Kelurahan 		

Kinerja

No	Sub Indikator	Ada	Tidak
1	Strategi Dalam Pemberdayaan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat b. Fasilitasi Dalam Pemasaran Produk Unggulan dari masyarakat 		
2	Kebijakan Dalam Pemberdayaan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Ada Tidaknya Regulasi dalam Pemberdayaan Masyarakat 		
3	Pembinaan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Forum-Forum Kebersamaan Seperti Gotong Royong b. Reward Bagi Perangkat dan Kelompok 		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4	Budaya Kerja		
	a. Apakah telah mendata kehadiran pegawai secara rutin		
	b. Apakah telah memiliki standar jam pelayanan		
	c. Apakah sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan masyarakat		

Inisiatif dan Kreatifitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat

	Sub Indikator	Ada	Tidak
1	Visi Misi Pemberdayaan Masyarakat		
2	Kebijakan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat		
4	Eksistensi Institusi Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur		

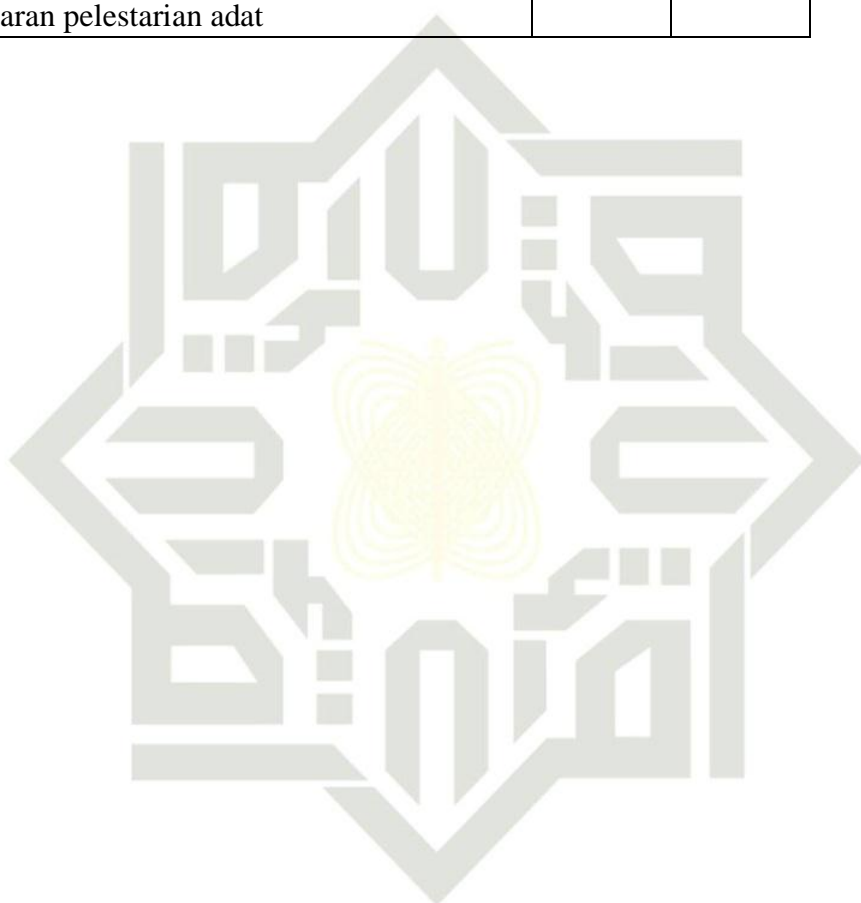
Kelurahan Berbasis Teknologi Informasi/ Egovernment

No	Sub Indikator	Ada	Tidak
1	Ketersediaan Sistem Teknologi Berbasis Internet		
	a. Jaringan Internet		
	b. Website Kelurahan		
2	Perangkat Komputer		
	a. Software dengan spesifikasi minimal untuk operasi jaringan internet		
	b. Hardware dengan spesifikasi minimal untuk operasi jaringan internet		
3	Administrasi		
	a. Administrasi Berbasis teknologi		
	Administrasi Umum		
	Administrasi Kependudukan		
	Administrasi Keuangan		
	Administrasi Pembangunan		
	Administrasi lainnya		
	b. Perangkat yang Mengelola Teknologi Informasi		
	c. Tersedia tokoh pemuda teknopreneur tingkat RT/RW		
	d. Perpustakaan Online		
	e. Internet Gratis/ Hotspot		

5. Pelestarian Adat Budaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub Indikator	Ada	Tidak
Pembinaan partisipasi masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya		
Keterlibatan kelembagaan adat dalam pelestarian adat dan budaya		
Pembinaan seni budaya setempat		
Kebijakan menjaga kelestarian adat		
Aplikasi anggaran pelestarian adat		



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Untuk Kelurahan Perawang

1. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui adanya kebijakan permendagri dalam penyelenggaraan pemerintahan?
2. Apakah Kelurahan Pernah melakukan sosialisasi/ pelatihan terkait penyelenggaraan pemerintahan?
3. Apakah pemerintah kelurahan memberikan penugasan kepada perangkatnya?
4. Apakah ada data profil kelurahan?
5. Apakah pemerintah kelurahan pernah memberikan penghargaan khusus untuk masyarakat?
6. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan?
7. Apakah ada Laporan Pertanggung jawaban kantor kelurahan?
8. Bagaimana kelengkapan buku administrasi pada kantor kelurahan ini?
9. Bagaimana bentuk peningkatan kapasitas kelompok masyarakat yang ada di kelurahan ini?
10. Apakah yang menjadi produk unggulan di kelurahan ini?
11. Seperti apa fasilitas yang diberikan untuk pemasaran produk unggulan?
12. Bagaimana kebijakan pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat?
13. Menurut bapak/ ibu bagaimana kinerja pegawai kelurahan?
14. Apakah kelurahan perawang pernah mengadakan kegiatan forum-forum kebersamaan?

15. Seperti apa standar jam pelayanan di kantor kelurahan ini?

16. Menurut bapak/ ibi seperti apa inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat?

17. Apa saja lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan perawang?

18. Apakah semua kegiatan sudah menggunakan teknologi informasi?

19. Apakah kelurahan memiliki aplikasi yang berbasis internet?

20. Apa adat istiadat yang ada di kelurahan perawang?

21. Bagaimana cara pemerintah kelurahan melestarikan adat istiadat dan budaya yang ada?

22. Apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan ini?

23. Aspek Komunikasi

a. Apakah kebijakan mengenai permendagri ini pernah disosialisasikan?

Apakah tersedia penjelasan dan petunjuk teknis dan perintah dalam kebijakan ini?

24. Aspek Sumber daya

Apakah para staff kelurahan mempunyai cukup kecakapan dalam penyelenggaraan pemerintahan?

Apakah bapak/ ibu tahu dan mengerti wewenang, tugas pokok dan fungsi nya dalam setiap tugas penyelenggaraan pemerintahan?

25. Disposisi

Bagaimana sikap staff kelurahan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan ini?

26. Struktur Organisasi

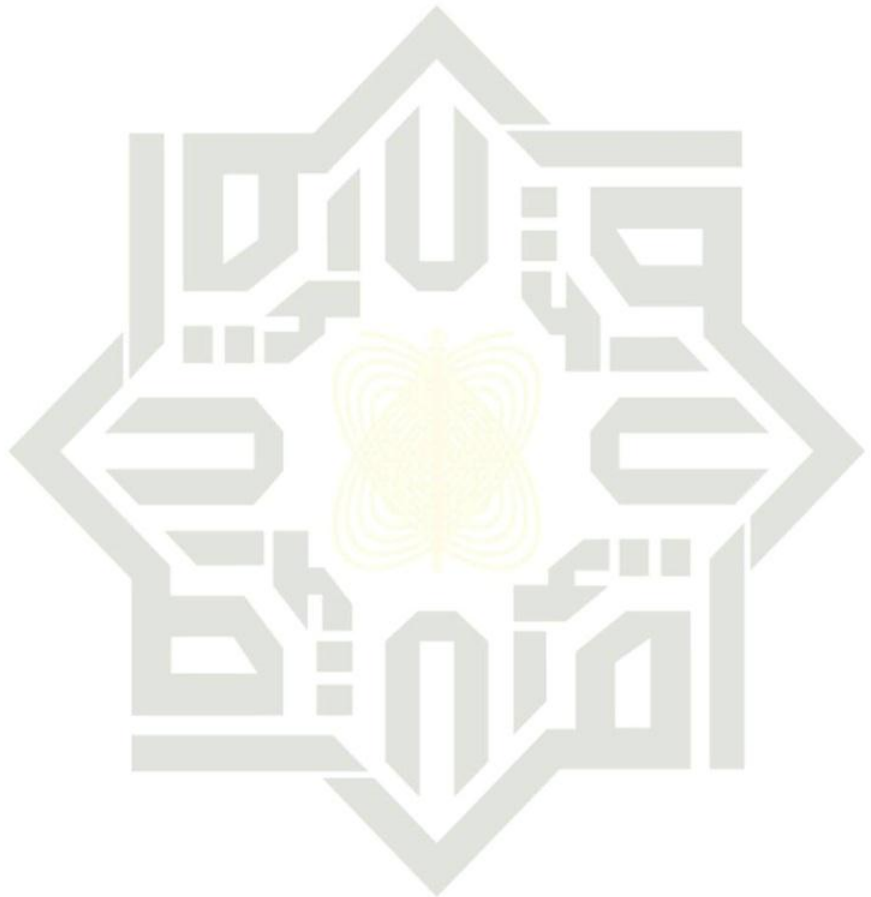
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah pemerintah kelurahan sudah mempunyai Standar Operational Prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan?

Apakah pengawasan-pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan oleh kecamatan dan kabupaten?



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan Untuk Masyarakat (Ketua RT, Ketua RW, yang memiliki Produk Unggulan

1. Bagaimana Pendapat Bapak/ Ibu mengenai perkembangan Sarana/ Prasarana yang ada di Kelurahan Perawang?
2. Bagaimana menurut bapak/ Ibu mengenai pelayanan yang diberikan oleh pegawai pemerintah kelurahan? apakah sudah sesuai jadwal dan SOP yang telah ditentukan?
3. Apakah Ada Reward/ Penghargaan yang pernah diberikan oleh pemerintah kelurahan?
4. Apakah pemerintah kelurahan pernah memberikan fasilitas dalam produk unggulan?
5. Apakah ada kegiatan forum masyarakat seperti gotong royong, Musrenbang, sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan dan lainnya?
6. Menurut bapak/ ibu bagaimana masyarakat kelurahan perawang dalam melestarikan adat dan budaya?

DOKUMENTASI

1. Hal
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Bapak Nanang Suhendra, S.STP, Lurah Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak



Ibuk Suhartati, S.Sos, Sekretaris Lurah Perawang Kecamatan Tualang Kbaupaten Siak

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibuk Nur'Aisyah, S.Sos, Kepala Seksi Pemerintahan



Bapak Sudirman, S.H, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibuk Jumi, Staff Pegawai Kelurahan



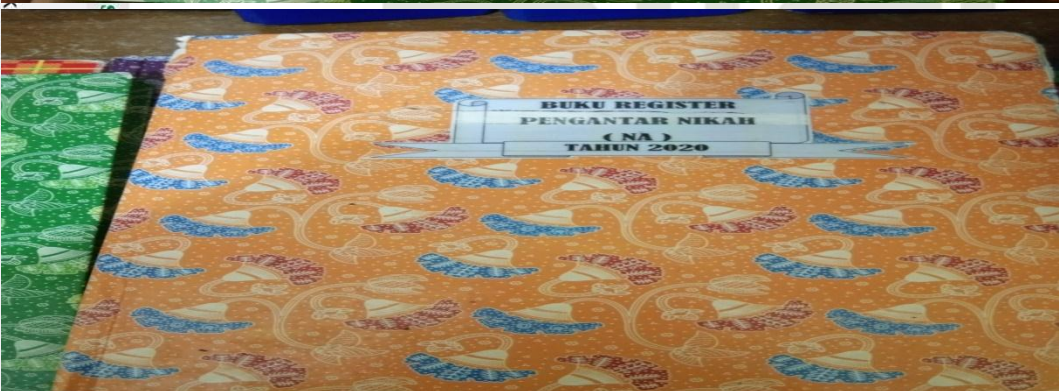
Ketua RW 04 Kelurahan Perawang

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

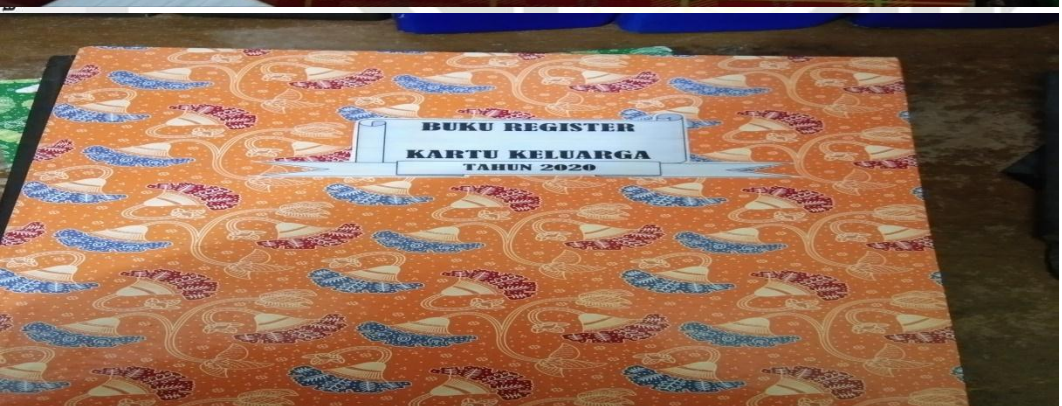
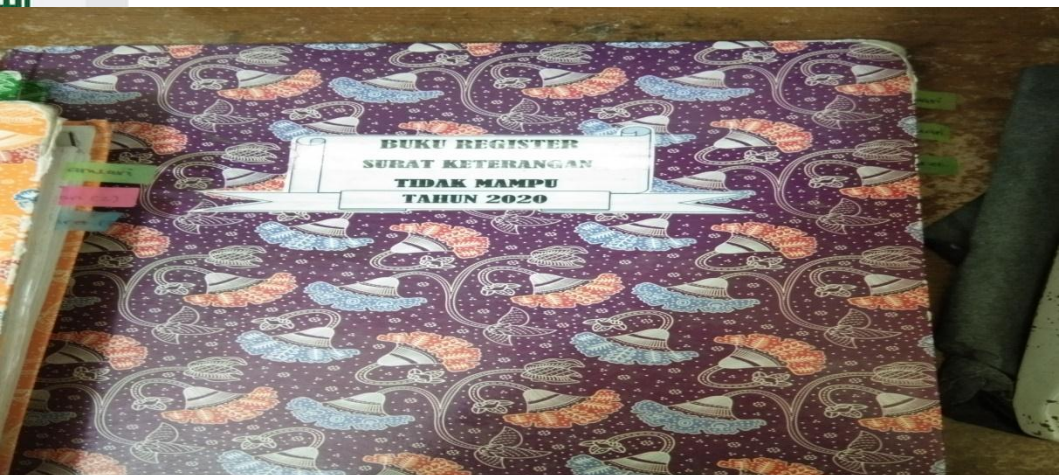


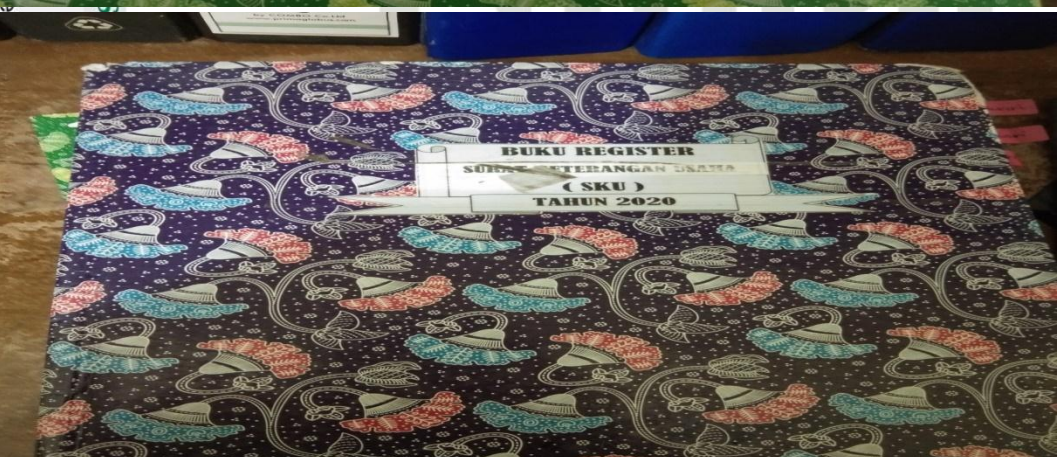
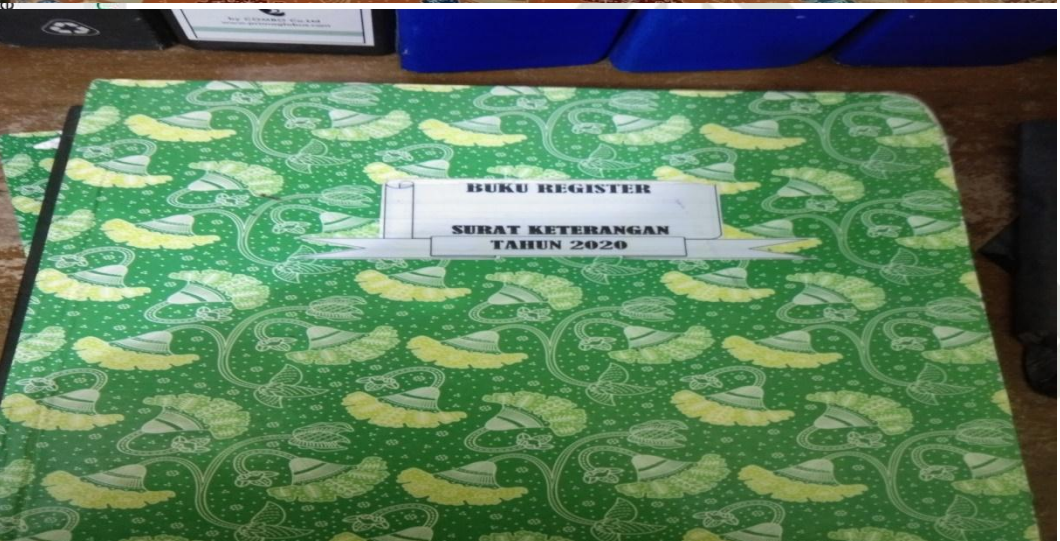
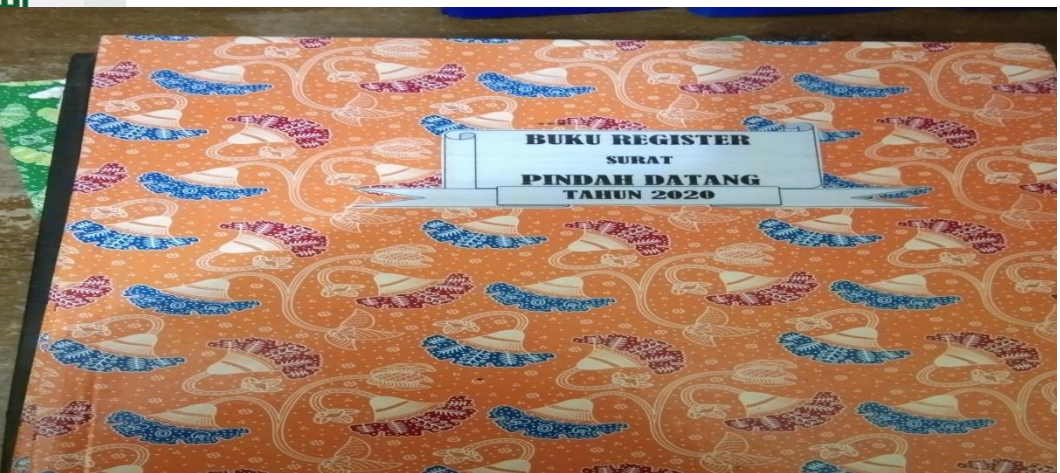
Bapak Basri T, Ketua RT 07 Kelurahan Perawang

Perengkapan Administrasi dan Kegiatan Wirid Kelurahan

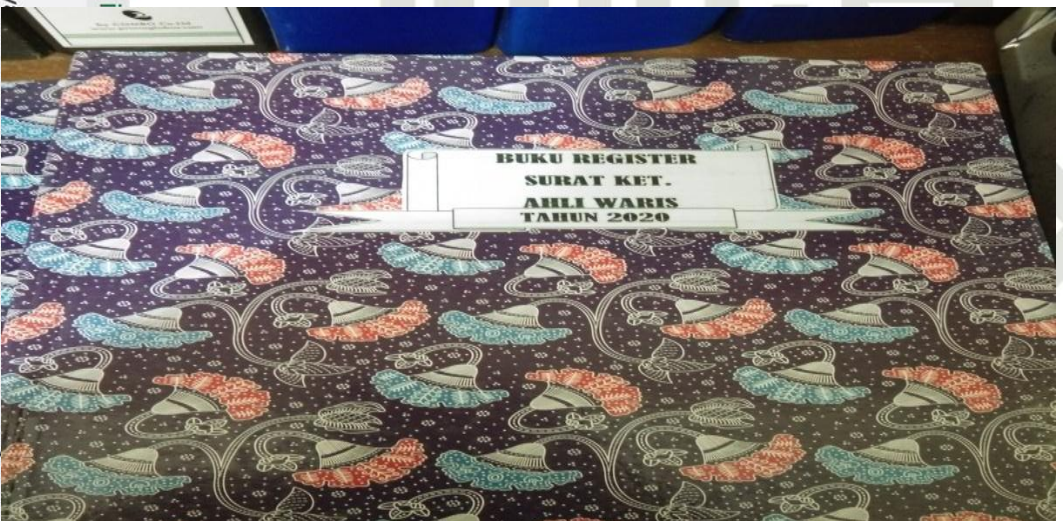
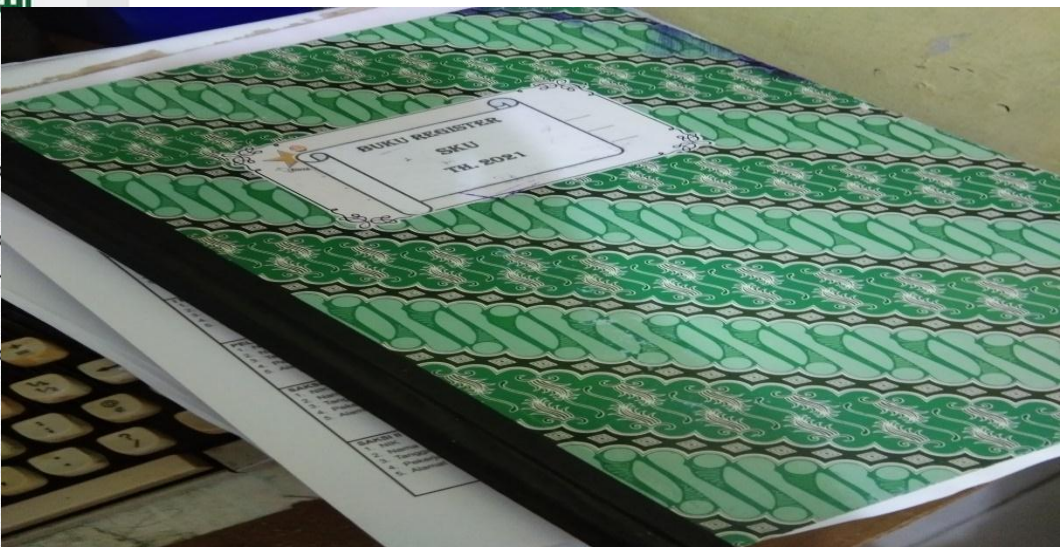


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/Rumah Dinas Jabatan Blok. II
 SIAK SRI INDRAPURA

Nomor : 071/Kesbangpol/352
 Lampiran :
 Perihal : **Rekomendasi Riset**

Kepada Yth:
CAMAT TUALANG

di -

Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37523 Tanggal 28 Desember 2020 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara;

Nama : **YOLA MELINDA**
 NIM : 11775201461
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : **ANALISIS EVALUASI PERKEMBANGAN TATA KELOLA KELURAHAN DI KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura
 Pada tanggal : 29 Desember 2020

a.n. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**
 Kasi Kesatuan Bangsa

AWALUDDIN, SE
 NIP. 19771213 201102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska di Pekanbaru;
- Lurah Perawang Kecamatan Tualang;
- Yang Berkenaan



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN TUALANG KELURAHAN PERAWANG

JL. ARIF RAHMAN HAKIM KODE POS 28772

SURAT KETERANGAN

Nomor: 226 /KP/VII/2021

Lurah Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YOLA MELINDA
NIM : 11775201461
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : S1
Judul Penelitian : "Analisis Evaluasi Perkembangan Tata Kelola Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak".

Benar nama yang tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Kelurahan Perawang dari tanggal 29 Desember 2020 s/d tanggal 08 Juli 2021 dan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mengikuti ketentuan Protokol Covid-19.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan.

Perawang, 08 Juli 2021

**An. LURAH PERAWANG
SEKUR**



SUHARTATI, S.Sos
NIP. 19820919 200701 2 004

RIWAYAT HIDUP



Yola Melinda, dilahirkan di Perawang pada tanggal 20 Juni 1998. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Syafrizal dan Ibu Nurlaini. Peneliti menyelesaikan pendidikan di TK PGRI Perawang pada tahun 2004. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SD Negeri 005 Tualang dan tamat pada tahun 2010 kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Tualang dan selesai pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK N 1 Tualang dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 peneliti melanjutkan Program Studi Strata-1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada program studi Ilmu Administrasi Negara (ANA) melalui jalur BMPTN.

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Perawang, dengan judul penelitian “**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)**”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah (Oral Comprehensif) pada hari Jum’at, tanggal 23 Juli 2021 dan Alhamdulillah peneliti dinyatakan **LULUS** dengan Predikat **CUMLAUDE** dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

1. Diketahui bahwa hak cipta ini adalah milik pribadi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin dari penulis.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.